

ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI RIAU DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI

Helly Aroza Siregar

Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Indonesia
Jalan Jend. A. Yani No. 78-88 Pekanbaru 28127

ABSTRACT

The aims of this study are to determine whether there is influence between financial performance as measured by the ratio of fiscal independence, effectiveness and efficiency of regional finance ratios to economic growth. The economic growth was measured by using a ratio of GDP growth. The study also seeks to prove whether there is a moderating effect arising between the interaction of Capital Expenditure and financial performance to the economic growth. This research is quantitative descriptive where data used are secondary data obtained from the budget of Riau Province and LRA Riau Province over the last 10 years ie from 2006 to 2015. Data were analyzed using multiple linear regression analysis and to test the moderating effects used Moderated Analysis Regression (MRA). The results showed that in the last ten years (2006-2015) Fiscal Independence and Financial Efficiency does not significantly influence to economic growth while the financial effectiveness significantly influence to Economic Growth in Riau Province. In addition, the ratio of Capital Expenditure on regional expenditure can not be used as a moderating variable in this study because the ratio of Capital Expenditure can not strengthen the links between the Fiscal Independence, Effectiveness and Efficiency of Finance to Economic Growth in Riau Province.

Keywords: *Fiscal Independence, Financial Effectiveness, Financial Efficiency, Economic Growth and Capital Expenditure Ratio*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara kinerja keuangan yang diukur melalui rasio kemandirian fiskal, rasio efektivitas dan efisiensi keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Adapun pertumbuhan ekonomi diukur dengan menggunakan rasio pertumbuhan PDRB. Penelitian ini juga berupaya untuk membuktikan apakah terdapat efek moderasi yang ditimbulkan antara interaksi Belanja Modal dan kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dimana data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari APBD Provinsi Riau dan LRA Provinsi Riau selama 10 tahun terakhir yaitu dari tahun 2006 sampai dengan 2015. Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dan untuk menguji efek moderasi digunakan Moderated Analysis Regression (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam sepuluh tahun terakhir (2006-2015) Kemandirian Fiskal dan Efisiensi Keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

sedangkan Efektifitas Keuangan berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Riau. Selain itu, Rasio Belanja Modal terhadap Belanja Daerah tidak dapat dijadikan variabel moderasi dalam penelitian ini karena rasio Belanja Modal ini tidak dapat memperkuat hubungan antara Kemandirian Fiskal, Efektifitas dan Efisiensi Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Riau.

Kata Kunci: Kemandirian Fiskal, Efektifitas Keuangan Daerah, Efisiensi Keuangan Daerah, Pertumbuhan Ekonomi dan Rasio Belanja Modal

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu negara untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Menurut Sukirno (2008: 423) pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian mampu menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat dalam suatu periode tertentu. Dengan perekonomian yang terus tumbuh maka kesempatan kerja, pengurangan tingkat kemiskinan, perbaikan gizi dan kesehatan, termasuk pendidikan akan semakin baik.

Negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang positif menunjukkan bahwa masyarakat yang berada di negara tersebut sudah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya bahkan mampu memperoleh kesejahteraan. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang menurun menunjukkan bahwa kondisi kesejahteraan masyarakat pada negara tersebut juga menurun.

Fenomena yang terjadi adalah suatu kenyataan dimana pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2015 adalah 4,79 %, ini merupakan posisi terendah selama 6 tahun terakhir (BPS, 2016). Masalah pertumbuhan ekonomi yang menurun juga terjadi di Provinsi Riau. Pertumbuhan ekonomi Riau pada Triwulan pertama tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 0.18% dibandingkan dengan Triwulan pertama pada tahun 2014 (Rubby: 2015).

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat disebabkan berbagai faktor. Salah satu diantaranya adalah pengelolaan keuangan pada pemerintahan yang berjalan dengan baik. Tata kelola yang baik (*good governance*) ini akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, maka daerah menjadi pusat pengelolaan keuangan. Daerah diharuskan mengelola keuangan secara ekonomis, efisien dan efektif. Hal ini dipertegas Suwandi et, al. (2015) yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan oleh pemerintah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi prinsip *value for money* serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut Suwandi et, al. (2015).

Penilaian kinerja pengelolaan keuangan tersebut dilakukan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran sebagai instrumen kebijakan pemerintah harus dapat menunjukkan kinerja yang baik. Tujuannya untuk penilaian secara internal maupun dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga diharapkan bisa menimbulkan efek domino yang positif yaitu mengurangi pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan (Astuti 2015).

Kinerja keuangan pemerintah dapat diukur dengan menggunakan rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas dan efisiensi. Menurut Rusydi (2010) kemandirian daerah ini dicerminkan dengan kemampuan daerah menghasilkan penerimaan pendapatan yang diperoleh daerah yang berasal dari potensi-potensi ekonomi daerah atau yang disebut juga pendapatan asli daerah.

Studi terdahulu yang dilakukan membuktikan bahwa kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Ani dan Dwirandra 2014; Astuti 2015). Namun demikian, Sukarni dan Budiasih (2016) membuktikan sebaliknya. Selain itu Astuti (2015) membuktikan bahwa rasio efektivitas berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun rasio efisiensi tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu Ani dan Dwirandra (2014) menyebutkan bahwa kinerja keuangan yang terdiri dari rasio kemandirian menunjukkan bahwa berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan pertumbuhan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

TELAAH LITERATUR

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menurut Ginting dan Rasbin (2010) menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen (BPS: 2015). Pertumbuhan Product Domestic Regional Bruto/PDRB diukur berdasarkan PDRB Harga Konstan (Muda: 2012). Berikut adalah formula pertumbuhan PDRB yang digunakan dalam penelitian ini:

$$\text{Pertumbuhan PDRB} = \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100\%$$

Kinerja Keuangan

Menurut Syafrial (2009), kinerja merupakan kuantitas dan kualitas pekerjaan yang diselesaikan oleh individu, kelompok, atau organisasi. Pada sektor pemerintahan, kinerja dapat diartikan sebagai suatu prestasi yang dicapai oleh pegawai pemerintah atau instansi pemerintah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam suatu periode. Sedangkan menurut Astuti

(2015) kinerja keuangan pemerintah dapat diukur melalui rasio kemandirian, rasio efisiensi dan rasio efektifitas keuangan daerah.

Halim (2004) menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang di perlukan daerah. Menurut Anwar (2015) Kemandirian fiskal didefinisikan sebagai kondisi kemandirian keuangan daerah yang diukur dengan rasio antara PAD dan TPD. Dengan demikian formula untuk menghitung Kemandirian Fiskal adalah sebagai berikut:

$$\text{Kemandirian Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Menurut Halim (2004), efektivitas keuangan pemerintah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Menurut Putra (2015) untuk mengukur rasio efektifitas keuangan daerah dapat menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Menurut Halim (2004) rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dibandingkan dengan realisasi pendapatan (penerimaan) yang diterima. Dengan demikian maka formula yang digunakan untuk menghitung besarnya rasio efisiensi keuangan daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total Realisasi Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

Belanja Modal

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf c Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang perubahan Permendagri Nomor 13/2006, Tentang pengelolaan Keuangan Daerah digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Belanja Modal merupakan bagian dari Belanja Daerah yang dialokasikan untuk pembangunan di daerah. Dengan demikian maka proporsi Belanja Modal yang mendekati 100% jika dibandingkan dengan Belanja Daerah menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah telah mengalokasikan dana yang diperoleh daerah untuk semaksimal mungkin meningkatkan pembangunan di daerah tersebut.

Menurut Suwandi dan Tahar (2015) rasio Belanja Modal dapat dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Hubungan Antara Kemandirian Fiskal dengan Pertumbuhan Ekonomi

Kemandirian fiskal menunjukkan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan potensi pendapatan asli dari daerah itu sendiri yang diwujudkan dalam bentuk realisasi anggaran. Kemandirian fiskal secara jelas menggambarkan bagaimana suatu daerah dapat berdiri sendiri sehingga tidak tergantung pada dana-dana yang berasal dari luar. Daerah yang mandiri secara fiskal menunjukkan pemerintahan daerah yang telah mapan dan mampu melakukan pembangunan di daerahnya secara mandiri. Hal ini akan berdampak pada pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana publik yang positif. Dengan demikian maka kegiatan ekonomi di daerah tersebut seharusnya dapat tumbuh dengan positif pula.

Ani dan Dwirandra (2014) membuktikan bahwa rasio kemandirian berpengaruh positif signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat diketahui bahwa kemandirian keuangan daerah atau kemandirian fiskal dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga didukung penelitian Astuti (2015). Berdasarkan hal itu maka dibuat hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 1: Kemandirian Fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi

Hubungan Antara Efektifitas Keuangan Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Bastian (2007: 77) efektivitas menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan. Artinya kinerja keuangan yang efektif menunjukkan bahwa tujuan pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat tercapai dengan baik. Dengan kinerja keuangan pemerintah yang efektif maka secara tidak langsung pertumbuhan ekonomi daerah akan meningkat.

Efektifitas keuangan daerah menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah selaku wakil masyarakat yang menyelenggarakan anggaran daerah telah mampu melaksanakan dan merealisasikan anggaran tersebut secara optimal. Semakin efektif keuangan daerah maka kinerja Pemerintah Daerah tersebut akan semakin baik.

Studi terdahulu yang dilakukan oleh Astuti (2015) membuktikan bahwa kinerja keuangan pemerintah yang efektif berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian maka dibuat hipotesis penelitian sebagai berikut:

Hipotesis 2: Efektifitas keuangan daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi

Hubungan Antara Efisiensi Keuangan Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi

Efisiensi merupakan perbandingan antara *output* atau *input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2002:4). Efisiensi adalah hubungan antara barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan sebuah kegiatan/aktivitas dengan sumber daya (*input*) yang digunakan (Ardila: 2015). Dengan demikian efisiensi keuangan daerah merujuk pada suatu kondisi dimana besarnya *output* berupa realisasi Belanja Modal atau Belanja Pembangunan dibandingkan dengan besarnya *input* berupa realisasi Pendapatan Daerah menunjukkan hasil yang seimbang atau ideal.

Berdasarkan hal ini, maka dapat diketahui bahwa kinerja keuangan pemerintah yang efisien ditunjukkan dengan keberhasilan pemerintah dalam mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan berpedoman pada standar yang sudah ada yaitu berupa anggaran.

Kinerja keuangan pemerintah yang efisien akan menggambarkan keberhasilan pemerintah dalam mencapai anggaran yang sudah ditargetkan, dengan melihat bagaimana kesanggupan keuangan daerah. Dengan kinerja yang efisien maka pemerintah sudah menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan yang dilakukan berjalan dengan baik dan tidak terbuang untuk keperluan yang tidak membangun.

Studi terdahulu yang dilakukan menunjukkan bahwa efisiensi keuangan daerah pada kenyataannya tidak berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi (Ani dan Dwirandra 2014; Astuti 2015). Meskipun demikian, peneliti menduga terdapat hubungan antara efisiensi keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, dibuat hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 3: Efisiensi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi

Hubungan Antara Kemandirian Fiskal dengan Pertumbuhan Ekonomi dengan dimediasi Belanja Modal

Kemandirian fiskal menunjukkan kondisi dimana suatu daerah telah mampu mengoptimalkan penerimaan dari sumber-sumber dalam daerah sendiri dan tidak terlalu tergantung pada bantuan dari pusat. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi partisipasi masyarakat maka semakin tinggi rasio kemandirian, dimana tersedia dana yang cukup bagi alokasi belanja modal (Suwandi dan Tahar 2015).

Semakin tinggi rasio kemandirian maka pembangunan daerah akan semakin maju, sehingga pertumbuhan ekonomi pun dapat meningkat (Halim, 2002 dalam Sularso dan Restianto, 2011). Ani dan Dwirandra (2012), menyatakan bahwa kinerja keuangan daerah berupa rasio kemandirian berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Interaksi alokasi belanja modal memperkuat pengaruh tingkat ketergantungan keuangan dan kemandirian keuangan pada pertumbuhan ekonomi (Sukarmi dan Budiasih 2016). Sedangkan studi lain membuktikan bahwa alokasi belanja modal dapat memediasi hubungan antara ketergantungan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi regional (Suwandi dan Tahar 2015). Berdasarkan hal ini dibuat hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 4: Belanja Modal memediasi pengaruh kemandirian fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi

Hubungan Antara Efektivitas Keuangan Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi dengan dimediasi Belanja Modal

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Suwandi dan Tahar 2015). Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Semakin tinggi kemampuan daerah dalam merealisasikan PAD yang ditargetkan maka semakin

dapat memenuhi kebutuhan belanja pembangunan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah (Sularso dan Restianto, 2011). Berdasarkan hal ini maka dibuat hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 5: Belanja Modal memediasi pengaruh efektifitas keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi

METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data kuantitatif yang meliputi data keuangan APBD dan realisasinya, serta data PDRB Provinsi Riau periode 2006-2015. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji data sekunder yang berupa Laporan Realisasi APBD Provinsi Riau yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.

Untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan juga pengaruh interaksi Belanja Modal sebagai variable moderasi dengan variable-variabel independen seperti kemandirian fiskal dan efektifitas keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi yang diproksi dengan PDRB digunakan alat uji berupa analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji koefisiendeterminasi, analisis regresi dan pengujian hipotesis.

Analisis regresi pada penelitian ini menggunakan dua tahap, yaitu:

Untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variable dependen. Analisis regresi yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan formula sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana:

- Y : Pertumbuhan ekonomi
- β_0 : Kontanta
- β_1 - β_3 : Koefisien Regresi
- X_1 : Kemandirian Fiskal
- X_2 : Efektivitas Keuangan Daerah
- X_3 : Efisiensi Keuangan Daerah
- e : error

Untuk menguji pengaruh interaksi variable moderasi dan variable independen terhadap variabel dependen. Analisis regresi yang digunakan adalah Multiple Regression Analysis (MRA) dengan formula sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 | X_1 \cdot X_4 | + \beta_6 | X_2 \cdot X_4 | + \beta_7 | X_3 \cdot X_4 | + e$$

Di mana:

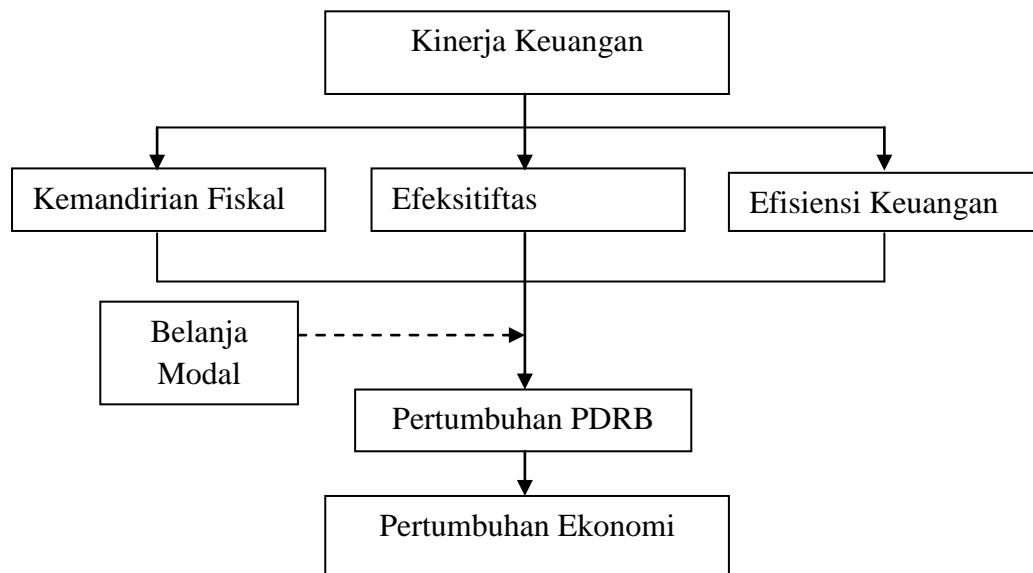
- Y : Pertumbuhan ekonomi
- β_0 : Kontanta
- β_1 - β_7 : Koefisien Regresi
- X_1 : Kemandirian Fiskal
- X_2 : Efektivitas Keuangan Daerah
- X_3 : Efisiensi Keuangan Daerah
- X_4 : Belanja Modal

- X_1X_4 : Interaksi antara Kemandirian Fiskal dan Belanja Modal
 X_2X_4 : Interaksi antara Efektivitas Keuangan Daerah dan Belanja Modal
 X_3X_4 : Interaksi antara Efisiensi Keuangan Daerah dan Belanja Modal
 e : error

Model Penelitian

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu ukuran yang sangat penting dalam menilai perkembangan pembangunan suatu negara. Pertumbuhan ekonomi yang baik mengindikasikan bahwa suatu daerah telah melaksanakan pembangunan dengan tujuan akhir adalah kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Ukuran yang digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto.

Dalam rangka meningkatkan PDRB maka pemerintah harus dapat melaksanakan kinerja keuangan yang baik. Kinerja keuangan ini dapat dikukur dengan menggunakan rasio-rasio seperti: rasio kemandirian fiskal, rasio efektivitas keuangan dan rasio efisiensi keuangan. Dampak yang dapat membangun penerekonomian suatu daerah dengan tujuan mensejahterakan masyarakat tentunya menuntut adanya dana public yang besar. Dana public tersebut merupakan Belanja Modal, dimana interaksi antara Belanja Modal yang dikucurkan pemerintah untuk pembangunan ini dengan kinerja keuangan pemerintah yang baik diduga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau. Berdasarkan hal ini maka dibuat suatu model penelitian sebagai berikut:



Gambar 1. Model Penelitian

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskriptif Statistik

Untuk melihat deskriptif statistik data penelitian dapat diketahui dari Tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1.Deskriptif Statistik Data Penelitian**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pertumbuhan_Ekonomi	10	-24.10	23.24	-2.42	14.03926
Kemandirian_Fiskal	10	26.95	50.31	38.89	5.76395
Efektifitas_Keuangan	10	102.04	139.68	117.78	12.09168
Efisiensi_Keuangan	10	68.89	116.26	94.34	14.93021
Rasio_Belanja_Modal	10	11.13	45.39	31.05	9.29048
Valid N (listwise)	10				

Sumber: Hasil Olahan Data (2016)

Tabel di atas menunjukkan bahwa terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau selama 10 tahun terakhir dimana penurunan pertumbuhan ekonomi tersebut berada pada angka 24,10%, sedangkan pertumbuhan ekonomi tertinggi berada pada persentase 23,24%.

Kemandirian Fiskal di Provinsi Riau terendah adalah 26,95%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan keuangan di Provinsi Riau pada angka tersebut sangat kecil dan sangat tergantung pada bantuan dari luar. Sedangkan kondisi Kemandirian Fiskal tertinggi berada di angka 50,31%, dimana hal ini menunjukkan bahwa pada angka demikian Pemerintah Provinsi Riau telah mampu meningkatkan kemandirian dalam membiayai pembangunan di daerahnya dengan mengandalkan keuangan dari daerah sendiri.

Efektifitas keuangan Provinsi Riau selama 10 tahun terakhir rata-rata berada pada angka 117,78%. Hal ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dimana Pemerintah Provinsi Riau telah mampu melaksanakan anggaran dengan baik dan efektif. Angka terendah dari efektifitas keuangan di Provinsi Riau adalah 102,04% dan yang tertinggi adalah 139,68%. Hal ini menunjukkan bahwa efektifitas keuangan di Provinsi Riau selalu berada di atas angka 100%.

Efisiensi keuangan menunjukkan seberapa baik Pemerintah Provinsi Riau melakukan minimalisasi biaya anggaran untuk memperoleh pendapatan yang besar. Efisiensi keuangan Provinsi Riau terendah berada pada persentase 68,89%. Angka ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Riau masih belum efisien. Sedangkan persentase tertinggi dari efisiensi keuangan daerah adalah 116,26%. Ini menunjukkan kinerja keuangan yang sangat efisien. Dalam sepuluh tahun terakhir rata-rata kinerja keuangan Provinsi Riau adalah 94,34%, yang menunjukkan bahwa secara rata-rata kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Riau adalah efisien.

Rasio Belanja Modal terhadap Belanja Daerah menunjukkan seberapa besar alokasi dana yang digunakan untuk pembangunan dari total seluruh Belanja Daerah yang dianggarkan. Rasio Belanja Modal terendah adalah sebesar 11,13%, hal ini menunjukkan bahwa besarnya Belanja Modal dari total seluruh Belanja Daerah hanya sebesar angka tersebut, dimana angka 11,13% adalah sangat kecil. Sedangkan rasio Belanja Modal tertinggi adalah 45,39%, dimana angka ini juga termasuk kecil karena masih berada di bawah angka 50%. Kemudian rata-rata Belanja Modal yang dialokasikan dari total Belanja Daerah dalam 10 tahun

terakhir adalah 31,05%, ini menunjukkan bahwa dalam jangka waktu 10 tahun, Pemerintah Provinsi Riau melaksanakan pembangunan dengan menggunakan Belanja Modal sebesar 31,05% dari total seluruh Belanja Daerah.

Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Hasil uji regresi linear berganda dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-37.853	24.561		-1.541	.174
Kemandirian_Fiskal_X1	-.615	.275	-.296	-2.236	.067
Efektifitas_X2	.749	.136	.755	5.518	.001
Efisiensi_X3	-.097	.113	-.120	-.855	.426

a. Dependent Variable: Pertumbuhan_Eko_Y

Sumber: Hasil Olahan Data (2016)

Berdasarkan nilai koefisien yang terdapat pada tabel di atas maka dapat dibuat rumus regresi sebagai berikut:

$$Y = -37,853 - 0,615 X_1 + 0,749 X_2 - 0,097 X_3$$

Adapun penjelasan dari persamaan regresi tersebut adalah sebagai berikut:

(1) Konstanta bernilai negatif sebesar 37,853 artinya jika variabel Kemandirian Fiskal, Efektifitas Keuangan dan Efisiensi Keuangan Daerah adalah konstan, maka Pertumbuhan Ekonomibernilai -37,853. (2) Koesifien regresi pengaruh Kemandirian Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi adalah negatif sebesar 0,615. Artinya, apabila Kemandirian Fiskal ditingkatkan 100% maka akan menyebabkan penurunan pada Pertumbuhan Ekonomi sebesar 61,5%. (3) Koesifien regresi pengaruh Efektifitas Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan ekonomi adalah positif sebesar 0,749. Artinya, apabila Efektifitas Keuangan Daerah ditingkatkan 100% maka akan meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 74,9%. (4) Koesifien regresi pengaruh Efisiensi Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi adalah negatif sebesar 0,097. Artinya, apabila Efisiensi Keuangan Daerah ditingkatkan 100% maka akan menyebabkan penurunan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 9,7%.

Dasar pengambilan keputusan untuk uji t parsial dengan berdasarkan padanilai signifikansi, dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: (1) Jika nilai sig. < 0,05 maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat; dan (2) Jika nilai sig. > 0,05 maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Dengan melihat pada distribusi nilai t_{tabel} , maka diperoleh nilai t_{tabel} adalah 2,228. Kemudian nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t_{hitung} . Hasil uji t pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel3 di bawah ini:

Tabel 3. Hasil Uji t

Variabel	t tabel	t hitung	Sig.	Keputusan	Hasil
Kemandirian Fiskal (X_1)	2,228	-0,615	0,067	H_0 diterima	Tidak berpengaruh signifikan
Efektifitas Keuangan (X_2)	2,228	0,749	0,001	H_1 diterima	Berpengaruh signifikan
Efisiensi Keuangan (X_3)	2,228	-0,097	0,426	H_0 diterima	Tidak berpengaruh signifikan

Sumber: Hasil Olahan Data (2016)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Kemandirian Fiskal tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi secara signifikan. Hal ini bertentangan dengan penelitian Ani dan Dwirandra (2014) dan Astuti yang membuktikan bahwa rasio kemandirian berpengaruh positif signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini membuktikan bahwa Efektifitas Keuangan Daerah dapat mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi secara signifikan. Hal ini mendukung penelitian Astuti (2015) yang membuktikan bahwa kinerja keuangan pemerintah yang efektif berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian juga membuktikan bahwa dalam rentang waktu 10 tahun terakhir (2006-2015) Efisiensi Keuangan Daerah pada kenyataannya tidak dapat mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi secara signifikan. Hal ini mendukung studi terdahulu yang dilakukan yang menunjukkan bahwa efisiensi keuangan daerah pada kenyataannya tidak berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi (Ani dan Dwirandra 2014; Astuti 2015).

Hasil Uji *Moderated Regression Analysis* (Uji Interaksi)

Uji interaksi dilakukan untuk melihat apakah variabel Rasio Belanja Modal dapat memoderasi pengaruh variabel Kemandirian Fiskal, Efektifitas Keuangan dan Efisiensi Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hasil uji interaksi dapat dilihat pada Tabel 4 berikut:

Tabel 4. Hasil Uji MRA

Variabel	Sig.	Dasar Keputusan	Keputusan	Hasil
Interaksi Kemandirian Fiskal dan Rasio Belanja Modal (X_1X_4)	0,675	$0,675 > 0,05$	H_0 diterima	Tidak dapat memoderasi
Interaksi Efektifitas Keuangan dan Rasio Belanja Modal (X_2X_4)	0,431	$0,431 > 0,05$	H_0 diterima	Tidak dapat memoderasi
Interaksi Efisiensi Keuangan dan Rasio Belanja Modal (X_3X_4)	0,846	$0,846 > 0,05$	H_0 diterima	Tidak dapat memoderasi

Sumber: Hasil Olahan Data (2016)

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam sepuluh tahun terakhir (2006-2015) Kemandirian Fiskal dan Efisiensi Keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi sedangkan Efektifitas Keuangan berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Riau. Selain itu, Rasio Belanja Modal terhadap Belanja Daerah tidak dapat dijadikan variabel moderasi dalam penelitian ini karena rasio Belanja Modal ini tidak dapat memperkuat hubungan antara Kemandirian Fiskal, Efektifitas dan Efisiensi Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Riau.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, Kemandirian Fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi sedangkan kondisi dimana suatu daerah yang mandiri secara fiskal akan menunjukkan kondisi pembangunan yang baik sehingga berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakatnya. Demikian pula dengan Efisiensi Keuangan yang tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Riau. Dengan demikian maka implikasi dari kondisi ini adalah dimana Pemerintah Provinsi Riau harus mengalokasikan APBD untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung meningkatnya investasi di daerah. Selain itu, pengalokasian Belanja Modal dalam struktur APBD harus lebih ditingkatkan lagi dalam rangka meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana di Provinsi Riau.

DAFTAR RUJUKAN

- Ani, Ni Luh Nana Putri, dan A.A.N.B. Dwirandra. 2014. Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Pada Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan Kabupaten dan Kota. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 6.3 (2014):481-497.
- Ardila, Isna & Ayu Anindya Putri. 2015. Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value For Money Pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Volume 15 No. 1/ Maret 2015*.
- Astuti, Wuku. 2015. Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Pengangguran Dan Kemiskinan (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Pulau Jawa Periode 2007-2011). *Jurnal EBBANK, Vol. 6, No. 1. 1-18*.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2015*. Berita Resmi Statistik No. 16/02/Th.XIX, 05 Februari 2016.
- Badan Pusat Statistik. 2015. *Riau Dalam Angka*. Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. Pekanbaru.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit BPFE, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Ginting, Ari Mulianta dan Rasbin. 2010. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Sebelum Dan Setelah Krisis. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Vol.2 (1)*.
- Halim, Abdul. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. UPP AMP YKPN Yogyakarta.

- Mardiasmo, (2002). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta, Penerbit Andi.
- Muda, Iskandar. Variabel yang Mempengaruhi Fiscal Stress Pada Kabupaten/Kota Sumatera Utara. *Jurnal Keuangan & Bisnis. Volume 4 No. 1, Maret 2012.*
- Putra, Agus Purnomo Adi dan Ni Gusti Putu Wirawati,. 2015. Penilaian Kinerja Berbasis Value For Money Atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabanan. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana. 11.1 (2015): 252-268.*
- Rubby, Ikhwanul. 2015. *BPS: Pertumbuhan Ekonomi Riau Mengalami Pertumbuhan Negatif.* Diunduh tanggal 9 September 2016. [http://pekanbaru.tribunnews.com/2015/05/05/bps-pertumbuhan-ekonomi-riau-mengalami-pertumbuhan-negatif.](http://pekanbaru.tribunnews.com/2015/05/05/bps-pertumbuhan-ekonomi-riau-mengalami-pertumbuhan-negatif)
- Rusydi, Bahrul Ulum. 2010. *Analisis Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dan Deteksi Ilusi Fiskal.* Universitas Dipenogoro, Semarang.
- Sukarni, Ni Wayan dan IGA Nyoman Budiasih. 2016. Alokasi Belanja Modal Sebagai Pemoderasi Pengaruh Kinerja Keuangan Pada Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 5.3 (2016) : 545-572*
- Sukirno, Sadono. 2008. *Makro Ekonomi Teori Pengantar.* Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa.
- Sularso dan Restianto. 2011. *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah.* Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto.
- Suwandi, Kurni Adi, dan Tahar. 2015. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota D.I. Yogyakarta). *Jurnal InFestasi Vol. 11, No. 2.118-136.*
- Syafrial. 2009. *Pengaruh Ketepatan Skedul Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Manajerial SKPD pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun.* Tesis. Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.